



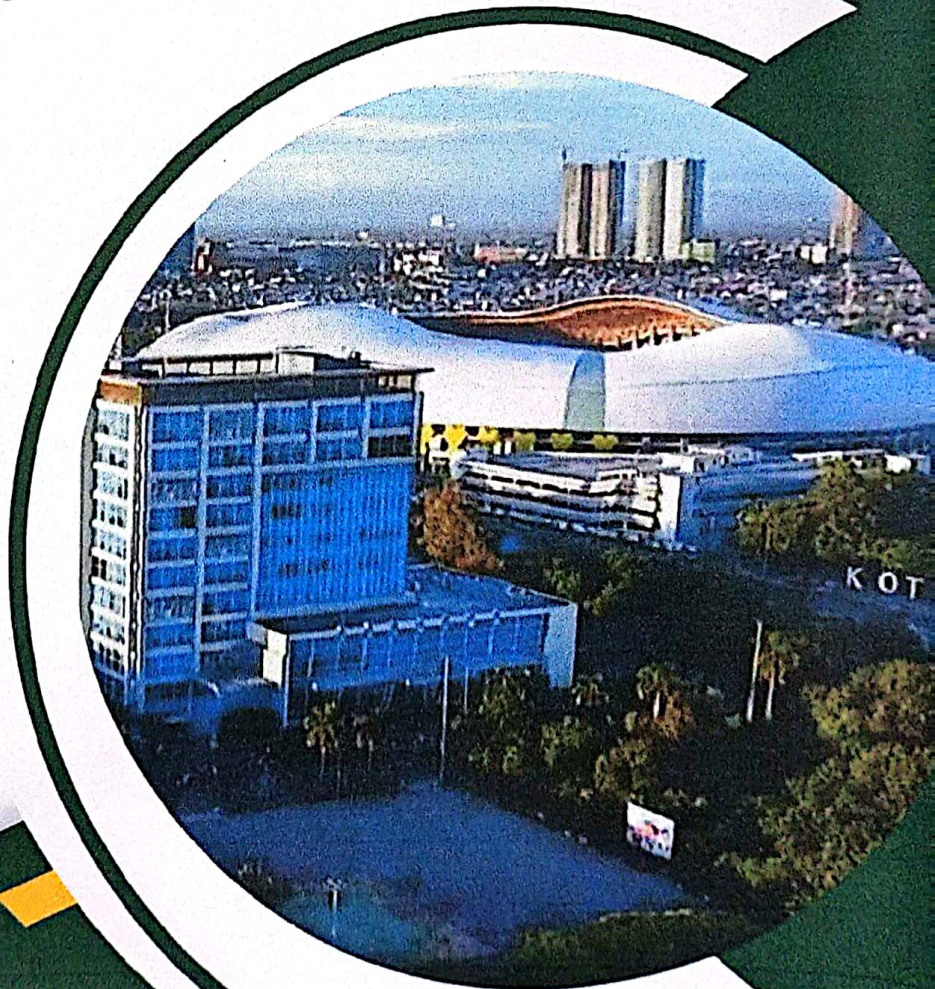
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2027

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN ANGGARAN 2026



DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kota Bekasi.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Untuk mengintegrasikan usulan masyarakat dan menyelaraskan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antar perangkat daerah untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2027.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Pembahasan dan penajaman program, kegiatan prioritas, Indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan anggaran untuk Prioritas Pembangunan terkait Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah serta perumusan rekomendasi penyempurnaan sebagai dasar penetapan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2027.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Februari 2026

b. Tempat Pelaksanaan

Ruang Rapat DPPPA Kota Bekasi Lantai 5 Gedung D Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

b. Kota Bekasi Peserta FKP

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
16. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
17. Ketua TP. PKK Kota Bekasi;
18. Ketua DWP Kota Bekasi;
19. Ketua GOW Kota Bekasi;
20. Ketua HWDI Kota Bekasi;
21. Ketua Pusat Pelayanan Psikolog UNISMA'45 Kota Bekasi;
22. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi (KPAD);
23. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi;
24. Ketua Dompot Dhuafa Kota Bekasi;
25. Ketua APSAI Kota Bekasi;
26. Ketua PUSPAGA Kota Bekasi;
27. Ketua PPDII Kota Bekasi;
28. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
29. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi;
30. Ketua Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI).

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka.

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 s.d 10.00 WIB	Pembukaan - Pembacaan Doa - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Sambutan DPPPA Kota Bekasi	
10.00 s.d 11.00 WIB	1) Pemaparan Materi Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi,	

Jam	Kegiatan	Keterangan
	2) Pemaparan Program Prioritas Pembangunan Daerah oleh Bapperida Kota Bekasi	
11.00 s.d 11.30 WIB	Penutup - Tanya Jawab	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2027, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang mempengaruhi pencapaian pembangunan gender dan perlindungan anak di Kota Bekasi yang menjadi tanggungjawab DPPPA Kota Bekasi. Pencapaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih dipengaruhi oleh :

- 1) rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik,
- 2) belum optimalnya keterwakilan perempuan di parlemen,
- 3) implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan lima klaster hak anak, terutama pada aspek perlindungan khusus dan penguatan sistem perlindungan berbasis data terpilah,

2. Analisis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPPPA Kota Bekasi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi peningkatan responsif gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Permasalahan – permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penguatan perencanaan berbasis gender, peningkatan sinergi lintas perangkat daerah, serta penajaman program dan kegiatan yang responsif terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Renja Tahun 2027 serta strategi kebijakan yang memerlukan sinergitas dari seluruh perangkat daerah untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan,

optimalisasi sistem perlindungan perempuan dan anak dan integrasi data berbasis teknologi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan gender, dan ramah anak di Kota Bekasi.

3. Rencana Aksi

Sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2027 yang tercantum dalam Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan menjadi salah satu program prioritas Kota Bekasi dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diperlukan rencana aksi yang terarah, terukur, dan responsif terhadap isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana aksi ini disusun sebagai tindak lanjut atas hasil identifikasi permasalahan dan analisis capaian indikator kinerja, guna memastikan program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), partisipasi ekonomi dan politik perempuan, serta penguatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu :

- 1) pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah gender sebagai dasar perumusan kebijakan,
- 2) fasilitasi penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memperkuat kualitas perencanaan berbasis kinerja yang sensitif terhadap kesenjangan gender.
- 3) Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas perempuan,
- 4) pelaksanaan pendidikan politik dan kepemimpinan bagi perempuan,
- 5) penguatan kelembagaan Gugus Tugas KLA,
- 6) peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak melalui UPTD PPA,
- 7) serta pengembangan sistem data dan pelaporan kasus yang terintegrasi.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bekasi;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP yang telah diselenggarakan dapat membantu DPPPA Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian pembangunan gender dan perlindungan anak di Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141,
Telepon (021) 28088808 Faksimile (021) 28088803
Laman : dpppa.bekasikota.go.id Pos-el : dp3a.sekretariat@gmail.com

BERITA ACARA
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
NOMOR : 000.7.2 / 70 / DPPPA.Set

Pada hari ini jumat, tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, berdasarkan surat undangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi nomor : 000.7/27/DPPPA.Set tanggal 18 Februari 2026 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (Forum Perangkat Daerah) pada DPPPA Kota Bekasi bertempat di ruang rapat DPPPA Kota Bekasi Lantai 5 Gedung D Komplek Wali Kota Bekasi. Setelah dilakukan pembahasan, peserta menyepakati hasil Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

1. Telah dirumuskan identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, dan jangka waktu penyelesaian sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

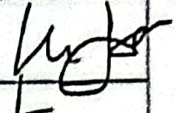
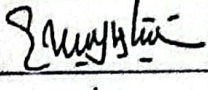
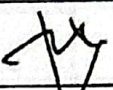
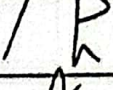
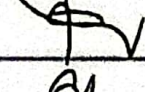
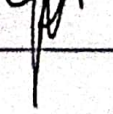
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik	Peningkatan kapasitas SDM Perempuan dalam bidang ekonomi dan politik melalui pelatihan ketrampilan dan sosialisasi/advokasi dalam bidang politik	Triwulan II s.d Triwulan IV
2	Belum optimalnya keterwakilan perempuan di parlemen	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya serta Pembinaan terhadap organisasi perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Triwulan I s.d Triwulan IV
3	Belum optimalnya pemenuhan lima klaster hak anak, terutama pada aspek perlindungan khusus dan penguatan	Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak,	Triwulan I s.d Triwulan IV

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
	sistem perlindungan berbasis data terpilah	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak, Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak serta perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, dan Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak, serta Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender dan data anak	

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu penyelesaian dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik..
3. Seluruh unsur peserta yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FORUM PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	L/P	ALAMAT/NO TELP	TANDA TANGAN
1	Redam	OPBA	L	0822000032	
2	Novita Dian P.	PLP - UNISMA Bekasi	P	0877.8090.2270	
3	Wulandari	Dignaker	P	0877.84834563	
4	Wahwan	Kec. Pamel	L		
5	Enny Pristini	Puspaga Kota Bks	P	087776763838	
6	Indri. F	DPBA	P	08953316668	
7	Fitriyana Y	Prasap Ulu	L	085409041788	
8	Aftan A	BPS	L	082126797978	
9	BELLA	BKPPDM	P	08111750482	
10	Feni	SW	P	0811946552	
11	Rahmings	PRILAD	L		
12	Ervin	Kesbangpol	P		
13	Deni tu	baprest.	P		
14	Murtasavah	DW	P	085779032749	
15	Leou riz	ICPAB	L	08121227500	
16	SRI DARMA-S	DisKOMINFO	P		

LAMPIRAN II UNDANGAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Lt 5, Telp (021) 28088808, Fax (021) 28088803

B E K A S I

Bekasi, 18 Februari 2026

Nomor : 000.7/27/DPPPA.Set
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Sinergitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027

Yth. Daftar terlampir

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: NOMOR: 000.7.2.4/ 472/BAPPERIDA.PPEPD tanggal 28 Januari 2026 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bekasi Tahun 2027, dengan ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan Tema: Prioritas Pembangunan "Peningkatan Responsif Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" pada:

hari/tanggal : Jumat, 20 Februari 2026
waktu : 09.00 WIB. s/d selesai
tempat : Ruang Rapat DPPPA Kota Bekasi, Lantai 5 Gedung D,
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi
Acara : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Catatan : Mengingat keterbatasan tempat, agar menugaskan 1 (satu) orang yang membidangi perencanaan.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,



Ridwan AS, S.H., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 196910302003121005

Tembusan :

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;

2. Wali Kota Bekasi;

3. Wakil Wali Kota Bekasi;

4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Undangan

Nomor : 000.7/27/DPPPA.Set

Tanggal : 18 Februari 2028

Kepada Yth :

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Ptl. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Staistik dan Persandian Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
16. Direktur RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
17. Ketua TP. PKK Kota Bekasi;
18. Ketua DWP Kota Bekasi;
19. Ketua GOW Kota Bekasi;
20. Ketua HWDI Kota Bekasi;
21. Ketua Pusat Pelayanan Psikolog UNISMA'45 Kota Bekasi;
22. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi (KPAD);
23. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi;
24. Ketua Dompot Dhuafa Kota Bekasi;

25. Ketua APSAI Kota Bekasi;
26. Ketua PUSPAGA Kota Bekasi;
27. Ketua PPD I Kota Bekasi;
28. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
29. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi;
30. Ketua Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI).

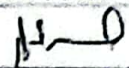
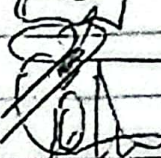
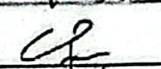
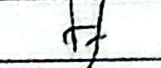
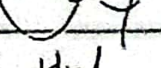
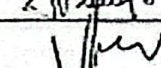
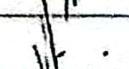
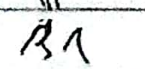
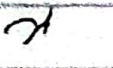
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak



Ridwan AS, S.H., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 196910302003121005

LAMPIRAN III DAFTAR HADIR

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	L/P	ALAMAT/NO TELP	TANDA TANGAN
1	Ridwan	EP3A	L	0812001587	R
2	Novita Dian Ivap	Kepo Pusat Pelayanan Psikologi UNISMA	P	087780902070	P
3	Mulandari	Disnaker	P	0877-84834563	M
4	Naharun.	Kec. Pomeh	L		N
5	Enny Pristini	Puspaga Kota Belcar	P	087776763838	Enny Pristini
6	Eunus A	DRPPA	P	08558820313	E
7	Indri	DP3A	P	089533116680	I
8	Hernandus Yu	Disnaker	L	0895404893768	H
9	Affan A	BPS	L	082126797978	A
10	BHELLA	RKPM	P	08211520902	B
11	Yeni	SDW	P	0811946552	Y
12	Raharjo	RPKAN	L		R
13	ERVIN	Kesbangpol	P		E
14	Duni H.	Bappea	P		D
15	Norhasanah	DWP	P	08577903	N
16	Neokriah	KPAB	L	0812122790	N
17	SRI Devina-S	DisKOMINFOKAB	P		S
18	Zessy	PSUP	P	081807511814	Z

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	LP	ALAMAT/NO TELE	TANDA TANGAN
	Fekriwan	Inspektur	L	0811539116	
	Fahrianto Dwi S	Indukorol	P	08153207077	
	Trilipuni	Px	P	08153207077	
	Susi	DPPK.B	P	08118891070	
	Suci	Renan	P	08112577670	
	Midhan	Dikus	P	08153207077	
	Dwi	Binkes	P	0817371111 261	
	Firdi Widyan	DPPK.B	P	082371537373	
	Rinto . P	DINSES	P		
	Ahmad Hummas	Disdik	L	08153207077	
	Amby	DIN SOS	L	081339218300	
	Tmas	GOW	P	08153207077	
	Ika	UPD PPA	P		
	Widyanah A	DPPPA	P	081295422045	
	Honung H	DPPPA	P	081210627187	
	Resta - S	DPSA	P	08111167650	
	Nvény Sumanti	DPSA	P	082313391369	
	Umi Annisa	DPSA	P	085211031154	
	Munung H	OPPA	P	08124906662	
	Titik H	DPSA	P	081310371064	
	Petris Vanda	DPSA	P	08123000113	
	NONTA	DPSA	P	081326248592	
	MONA	DPSA	P	081900200773	





PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141,
 Telepon (021) 28088808 Faksimile (021) 28088803
 Laman : dpppa.bekasikota.go.id Pos-el : dp3a.sekretariat@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
TAHUN 2025

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang telah ditandatangani pada tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik	Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Dan SAKIP tanggal 20–22 Oktober 2025 di Fave Premier Hotel, Cihampelas, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Bekasi Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman PPID tanggal 20 Agustus 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi di Aula Itko Lantai 4 Gedung D	  

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
2.	Masih banyaknya korban kekerasan pada anak	Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, dan Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak	Sosialisasi Pencegahan dan Perlindungan Anak bagi Masyarakat dan lingkungan sekolah tanggal 9 Juli – 12 Agustus 2025 di Kecamatan dan sekolah-sekolah Penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RAD Perlindungan Anak dengan tanggal 17 September 2025 dengan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi Rapat koordinasi terkait diseminasi kebijakan peraturan pemerintahan nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak (PP Tunas) di Sheraton Bandung Hotel yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA Pulic Hearing RAPERDA Perlindungan Anak 11-12 Desember 2025 bersinergi dengan DPRD Kota Bekasi	   
3.	Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Sosialisasi Perda Provinsi Jabar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Provinsi Jabar, Podjokan Garden yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 22 Mei 2025 di Balai Patriot	 

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
4.	Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial	Sosialisasi Pengembangan Direktori Layanan dan Sistem Rujukan bersama tanggal 31 Oktober 2025 di hotel oria jakarta yang diselenggarakan oleh KemenPPPA RI Finalisasi Pedoman Klasifikasi Bentuk – Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam SIMFONI PPA Versi 3 tanggal 02 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh KemenPPPA RI Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender KBG dalam penanggulangan bencana tanggal 3-4 November 2025 yang diselenggarakan oleh KemenPPPA RI di hotel four point by sheraton	  
5.	Belum optimalnya kelembagaan PUG	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Sosialisasi Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan tanggal 08 Oktober 2025 di Balai Patriot dengan peserta dari Perangkat Daerah se-Kota Bekasi Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 di Ruang Rapat DPPPA Kota Bekasi dengan peserta Perangkat Daerah se-Kota Bekasi	 

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
6.	Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota	Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak, dan Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	Rakor Kota Layak Anak tanggal 27 November 2025 di Aula Kemenag dengan peserta perwakilan dari setiap Perangkat Daerah Sosialisasi Sekolah Ramah Anak tanggal 18 Februari-04 Agustus 2025 di sekolah-sekolah Kota Bekasi	 
7.	Belum optimalnya pelaksanaan PPRG	Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025 tanggal 15-17 September 2025 di Balai Patriot Kota Bekasi dengan peserta Perangkat Daerah se-Kota Bekasi	 
8.	Belum banyaknya data terpilah gender dan data anak pada setiap Perangkat Daerah	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender dan data anak	Desk Data Kota Layak Anak pada Perangkat Daerah se-Kota Bekasi tanggal 19 Februari-20 April 2025 Zoom Meeting Sistem Informasi Gender dan Anak tanggal 24 April dengan KemenPPPA RI	 

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
9.	Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan/pada lembaga legislatif	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya	Zoom Meeting Capacity Building Perempuan politik tanggal 12 November 2025 diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat Sinergitas dgn KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia tanggal 21 Juli 2025 Rakor GOW tanggal 1 Desember 2025 di Balai Patriot Kota Bekasi	

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.


 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Dan Perlindungan Anak,
Ridwan AS. S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I /IV.b
 NIP. 196910302003121005